

PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI KENDARAAN ANGKUTAN UMUM DI TERMINAL TANJUNGPURI OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: erwandi.unka@gmail.com.

Abstract: *Public transport levies are one aspect that contributes to Regional Original Income that needs to be improved so that the management of these levies must be effective and transparent. This research aims to uncover the problem of managing public transport vehicle levies at the Tanjungpuri Terminal by the Sintang Regency Transportation Service. Qualitative research method with a descriptive analysis approach. The research results show that the levy mechanism is carried out by officers directly by visiting public transport vehicles entering the terminal with each entry counting as one stop. However, there are still public transport vehicles dropping off passengers outside the terminal without supervision. Officers monitor levies by visiting each terminal to ensure officers are always there during working hours and checking bookkeeping reports.*

Keywords: *Management; Retribution Levy; Public transportation.*

Abstrak : Retribusi angkutan umum menjadi salah satu aspek yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan sehingga pengelolaan dalam retribusi tersebut harus efektif dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan Pengelolaan Pungutan Restribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pungutan dilakukan petugas langsung dengan mendatangi kendaraan angkutan umum yang masuk terminal dengan hitungan setiap kali masuk dihitung satu ret. Namun demikian masih terlihat adanya kendaraan angkutan umum yang menurunkan penumpang di luar terminal tanpa adanya pengawasan. Pengawasan pungutan dilakukan oleh petugas dengan mendatangi setiap terminal untuk memastikan petugas selalu ada pada jam kerja dan pemeriksaan laporan pembukuan.

Kata Kunci : Pengelolaan; Pungutan Restribusi; Angkutan Umum.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan

pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan daerah dalam bentuk retribusi yang diberikan masyarakat dan dikelola pemerintah bertujuan untuk pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 1 ayat 7 Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. selanjutnya Pasal 1 ayat 13 Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan data tahun 2017 khususnya di terminal Tanjungpuri Kecamatan Sintang terdapat beberapa jenis kendaraan bermotor yang setiap harinya memerlukan jasa terminal adapun data tersebut sebagai berikut :

Tabel.1.1. Pungutan Retribusi Kendaraan di Terminal Tanjungpuri kecamatan Sintang Tahun 2017

No	Jenis kendaraan	Jumlah	Tarif Retribusi
1.	Oplet Kota	1.814 karcis	1.000.00
2.	Oplet Desa	886 karcis	3.000.00
3.	Bus Kecil	238 karcis	7.000.00
	Jumlah	2.938 karcis	

Sumber: Dinas Perhubungan tahun 2017

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat di jelaskan bahwa pada dasarnya jumlah angkutan umum yang terdata di terminal Tanjungpuri cukup banyak sehingga jika pengelolaan maksimal akan dapat memperoleh realisasi retribusi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Masih rendahnya realisasi pendapatan dari sektor retribusi terminal tersebut dapat dilihat dari laporan tahunan per desember 2017 sebesar Rp 9.759.000,- sedangkan pada desember 2018 sebesar Rp 8.955.000,-.(sumber data Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang) kenyataan ini tentunya dapat dipergaruhi berbagai faktor akan tetapi secara umum belum maksimalnya pengelolaan retribusi terminal dapat saja mempengaruhi dari pendapatan retribusi tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan

tentang Pengelolaan Pungutan Retribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Restribusi sangat penting untuk ditingkatkan melalui penertiban setiap kendaraan sebagai pengguna jasa terminal sehingga dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.

Ruang lingkup tugas administrasi perkantoran dapat dikatakan tugas pelayanan disekitar keterangan-keterangan yang berwujud 6 (enam) pola perbuatan (Gie, 2007 :16), yakni :

- a. Menghimpun yaitu : kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap untuk dipergunakan bilamana diperlukan.
- b. Mencatat yaitu : kegiatan yang membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Dalam perkembangan teknologi modern sekarang ini termasuk pula memateri keterangan-keterangan itu dengan alat-alat perekam suara sehingga dapat didengar, pencatatan dengan pita rekaman.
- c. Mengelola yaitu:bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan

maksud menyajikannya dalam bentuk yang berguna.

- d. Mengganda yaitu : kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan.
- e. Mengirim yaitu : kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepihak lain.
- f. Menyimpan yaitu : kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman.

Berdasarkan dari pemahaman para ahli tersebut dapat di asumsikan bahwa administrasi perkantoran menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan setiap pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. kelanjutan dari efektifitas administrasi yang berjalan dengan baik yaitu terpolanya perencanaan pada masa yang akan datang bagi instansi tersebut.

Terminologi pengelolaan administrasi jika di kaitkan dengan aspek pengelolaan pungutan retribusi dari kendaraan bermotor pada setiap terminal tentunya memiliki kesamaan dalam pendekatannya yaitu menghimpun, mencatat dan mengelola serta menyimpan berbagai pencatatan yang di hasilkan sebagai dokumen pelaksanaan tugas pada setiap instansi.

Sejalan dengan itu tugas pokok Dinas Perhubungan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan daerah kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menempatkan Bidang Perhubungan Darat yaitu Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal yang tugas pokoknya yakni melaksanakan penerimaan pendapatan daerah di bidang perhubungan darat sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme dapat diartikan sebagai hal kerja mesin, atau cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb). Selanjutnya menurut Poerwadarminta (2003:757) mendefinisikan “mekanisme adalah seluk beluk atau cara kerja suatu alat (perkakas) dan sebagainya. Secara umum mekanisme adalah mengetahui bagaimana cara menggunakan suatu alat sehingga kita tahu sampai dimana kemampuan suatu alat tersebut bekerja.” Selanjutnya menurut Yani (2000:275) “mekanisme adalah cara kerja suatu badan atau organisasi atau perkumpulan hal saling bekerja”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan hasil pekerjaan maksimal sehingga tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Proses dan mekanisme menjalankan sebuah aktivitas pelayanan khususnya di bidang pungutan retribusi diperlukan ketekunan dan disiplin kerja agar setiap pengguna jasa terminal yang menerima pelayanan memperoleh haknya sesuai dengan yang diperlukan.

Kegiatan pelayanan di terminal akan sangat mudah dinilai oleh masyarakat jika dijalankan dengan tidak tertib oleh karena itu terib dalam kerja merupakan unsur terdepan dalam birokrasi yang pada hakekatnya sebagai cerminan kesungguhan organisasi menjalankan dinamika kerja sesuai dengan tuntutan publik.

Mekanisme pelayanan pada pemilik usaha angkutan umum yang baik tentunya memiliki aturan dan proses yang sudah dibakukan sehingga petugas pelaksananya akan lebih mudah menginventarisir hal-hal yang berkaitan dengan tertib administrasi. Dengan adanya mekanisme yang terpola dengan benar setiap program produk layanan jasa umum yang menimbulkan konsekuensi dari pungutan retribusi sesuai dengan tujuan program penertiban kendaraan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah adalah penerimaan diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian pendapatan daerah menurut Menurut Nurcholis (2007 : 182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Menurut Rahman (2005:38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil

distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pengertian pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil" Sedangkan pengertian pemungutan menurut Pandiangan (2007:88) adalah sebagai berikut: "Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya."

Pungutan retribusi sebagai salah satu sumber dari pendapatan asli daerah tentunya harus sejajar dengan yang dilakukan pemerintah terhadap aspek dari pungutan tersebut sehingga dalam konteks demikian pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang baik dalam pengelolaan jasa yang digunakan masyarakat. Sehubungan dengan itu jasa layanan dari pemerintah tentunya harus memuaskan dan seimbang dengan yang di rasakan oleh pengguna jasa seperti kondisi dan keadaan terminal.

Odonnel dalam Anggraeni (2002 : 20) pengawasan atau *controlling* yaitu " pengawasan terhadap proses pelaksanaan yang telah maupun yang akan dijalankan sesuai dengan perencanaan sehingga diperoleh efisiensi

dan efektifitas. Dari berbagai pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan mengawasi secara langsung guna mengontrol agar tidak terjadi kesalahan prosedur pelaksanaan sehingga kegiatan akan lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan tujuan.

Menurut Widodo (2002 : 89) pengawasan berasal dari kata awas yang artinya melihat dengan jelas, dapat melihat dengan baik. Lebih lanjut Widodo (2002:89) kata awas dapat ditambah dengan imbuhan meng dan-I menjadi mengawasi yang berarti melihat dengan seksama akan tingkah laku atau sesuatu, mengamati dengan baik. Dengan demikian pengawasan adalah subjek (orang) yang melakukan pekerjaan pengawasan yaitu secara personal atau lembaga, dan pengawasan adalah kegiatan pemantauan yang sedang dilakukan. Selanjutnya menurut pendapat Suparno (2003 : 223) "pengawasan atau legislasi adalah upaya mencegah terjadinya kesimpang siuran dalam pelaksanaan kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan"

Dengan demikian pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggungjawab setiap pimpinan pada tingkat manajemen. Demikian juga dengan pelaksanaan seluruh kegiatan pada tingkat tertentu yang sengaja dibentuk secara resmi untuk mengawasi keberadaan objek-objek yang menjadi kewenangan direksi atau pimpinan lainnya di tingkat cabang, Pembentukan struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap operasionalisasi kerja

didalamnya melekat kewenangan mengawasi kerja atau kebijakan sesuai peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005 : 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya, secara holistik yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Lebih lanjut Nazir (2003:54) mengatakan bahwa:

”Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara memberikan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan aktual pada saat penelitian dilakukan tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian dengan jenis deskriptif termasuk dalam pendekatan kualitatif,

menurut Mardalis (2003 : 24) metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian adalah : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Kepala Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal. Untuk mendapatkan data-data yang di perlukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini di gunakan beberapa teknik pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi (*Pengamatan*), Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati tempat (*place*) dimana Pengelolaan Pungutan Restribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, pelaku (*aktor*) yang melakukan pekerjaan, kegiatan (*activity*) yang dilakukan pada proses-proses pelaksanaan pungutan retribusi bagi kendaraan bermotor di terminal TanjungPuri Sintang.
- b. Wawancara (*Interview*), Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara atau interview dengan orang yang menjadi subjek penelitian.

c. Studi Dokumentasi, Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk menggali data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut menyangkut Pengelolaan Pungutan Restribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Sintang secara geografi terletak diantara : - 00091 Lintang Utara - 00021 Lintang selatan - 1110211 Bujur Timur - 1110361 Bujur Timur. Batas-batas administrasi Kecamatan Sintang adalah : Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu dan Kecamatan Kelam Permai , Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tebelian, Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Tempunak

Berdasarkan batas administrasi tersebut dapat dijelaskan bahwa

kecamatan Sintang berada di tengah-tengah kabupaten Sintang yang memiliki akses dari seluruh kecamatan baik yang menuju ke luar kota maupun yang menuju jalur perhuluan seperti jalur jalan darat menuju Kabupaten Kapuas Hulu. dengan demikian untuk menanamkan usaha khususnya pada bidang bisnis perdagangan sangat strategis karena dapat di jangkau dari berbagai kecamatan di sekitarnya.

Keberadaan terminal yang ada di kota-kota sebagai upaya dalam menertibkan kendaraan umum berupa angkutan umum sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa angkutan baik keluar kota maupun dalam kota. Terminal umumnya di tempatkan di pasar-pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat agar dapat dengan mudah diketahui dan dijangkau secara luas oleh masyarakat. Untuk dapat menjamin ketertiban dalam proses pelayanan jasa angkutan umum tentunya harus di dasarkan pada pengelolaan oleh instansi pemerintah yaitu Dinas Perhubungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang diperoleh informasi bahwa dalam proses pelaksanaan pungutan di setiap terminal sudah ada penempatan personil atau petugas yang setiap hari harus berada di terminal. Secara lebih jelasnya dalam proses penunjukan pengaturan disesuaikan dengan jumlah personil pegawai dan honorer yang ada pada Bidang Perhubungan Darat dan sesuai dengan keperluan pada terminal. Khusus pada terminal pasar Junjung Buih

Tanjungpuri setiap harinya ada dua orang yang bergantian melaksanakan pemungutan.

Hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dipaparkan bahwa mekanisme pungutan sudah ada aturannya dalam bentuk SOP sehingga bagi setiap petugas harus dapat bertanggungjawab dalam pelaporannya. Adapun mekanismenya yaitu dengan mengisi daftar absen bagi petugas dan pada saat setelah selesai juga menyampaikan hasil dari perolehan pungutan sesuai dengan karcis pungutan yang beredar. Di dalam karcis yang di berikan kepada sopir angkutan umum sudah ada nomor seri sehingga tidak dapat di manipulasi dan sudah di daftarkan pada buku laporan setiap bulannya.

Berikutnya di kemukakan juga oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang bahwa terdapat juga berbagai permasalahan di lapangan yaitu belum tertibnya angkutan umum masuk ke terminal karena masih sering terjadi juga kendaraan angkutan umum paker atau menunggu penumpang di luar terminal. hal ini dijelaskan juga karena angkutan umum ada yang sistem jemput penumpang di toko-toko sekalian untuk memuat barang belanjaan penumpang. kendala demikian tentunya berdampak pada menurunnya pungutan di setiap terminal karena sistem pungutan dilakukan setiap kali kendaraan angkutan umum masuk terminal di kenakan biaya satu karcis. Proses penghitungan per unit kendaraan angkutan umum dalam setiap hari dapat

beberapa kali sesuai dengan jumlah masuk terminal sehingga hitungannya disebut satu rit per satu tiket atau karcis.

Selanjutnya dalam mekanisme pungutan biaya sebesar dua ribu rupiah langsung diterima oleh petugas terminal dan di catat di dalam buku laporan jumlah rit setiap hari dan disampaikan ke kantor pada esok harinya sesuai daftar tugas yang telah di tunjuk. penggunaan jasa terminal pada dasarnya sangat ramai tidak saja angkutan umum akan tetapi pengguna lainnya juga dapat dikenakan karena sifatnya angkutan. Sedangkan kendaraan pribadi tidak di ijinakan untuk parkir atau bongkar muat di terminal karena kriterianya bukan angkutan umum penumpang.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang dapat terhimpun dari kepala Dinas Perhubungan dapat di deskripsikan bahwa secara umum mekanisme dalam sistem pemungutan merupakan aspek penting bagi tercapainya tertib bagi setiap petugas dalam bekerja. pelaksanaan pemungutan juga dapat di katakana sebagai proses pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk angkutan umum agar dapat di manfaatkan oleh masyarakat sehingga peran petugas menjadi salah satunya menertibkan kendaraan angkutan umum.

Berikutnya dapat di deskripsikan bahwa dalam hal mekanisme juga sangat memungkinkan bagi setiap petugas untuk memberikan pengabdianya pada masyarakat dalam hal menertibkan kendaraan-kendaraan di terminal walaupun secara kuantitatif jumlahnya belum begitu banyak akan

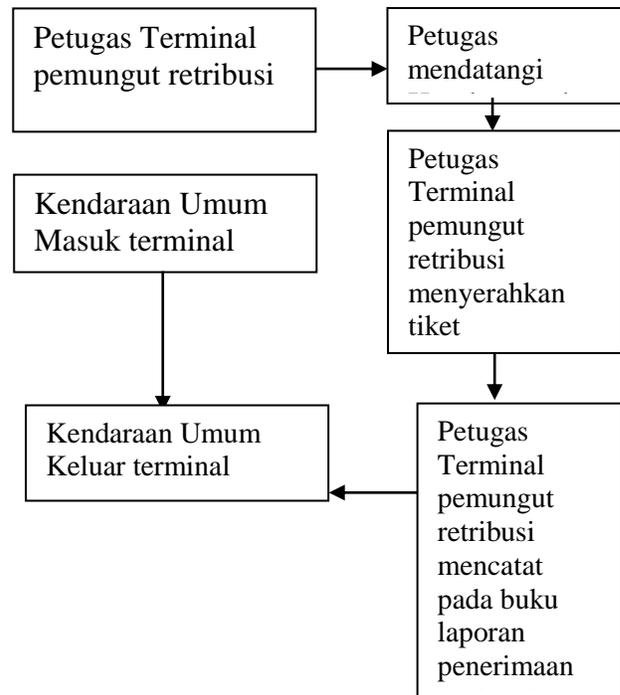
tetapi dengan adanya pelayanan jasa terminal dapat memberikan kenyamanan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh jasa tumpangan angkutan umum secara layak. Angkutan umum yang masih aktif di beberapa terminal yaitu angkutan umum luar kota yang secara rutin setiap hari masih terus beroperasi sehingga setiap petugas tetap harus melaksanakan pungutan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada saat penelitian terlihat di terminal Pasar Junjung Bui setiap hari dan jam kerja terlihat ada dua orang petugas yang menempati ruangan di teras terminal. selain itu dalam proses mekanisme pungutan petugas retribusi mendatangi kendaraan angkutan umum berupa mini bus dan oplet pada saat baru memasuki terminal dan menyerahkan satu lembar karcis serta menerima bayaran sebesar dua ribu rupiah. Setelah proses tersebut petugas mencatat jumlah kendaraan yang pada hari itu masuk terminal dengan hitungan karcis retribusinya. Pada karcis retribusi terdapat nomor seri karcis sebagai tanda bahwa karcis tersebut sudah di gunakan.

Mekanisme yang terlihat juga pada saat observasi lapangan yaitu sistem pencatatan yang dilakukan selanjutnya di himpun oleh koordinator terminal untuk diserahkan kepada bendara pada Bidang Perhubungan Darat. Untuk menetapkan individu petugas yang sesuai dengan jadwalnya penghitungan akan dilakukan dalam setiap bulan dan sistem pembayaran insentif pungutan dilakukan di kantor berdasarkan kehadiran dalam bekerja.

Adapun mekanisme pemungutan retribusi kendaraan umum dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1. Skema pungutan retribusi angkutan umum di terminal Tanjungpuri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.



Sumber : Data diolah dan dianalisis berdasarkan hasil observasi tahun 2019.

Berdasarkan pada mekanisme pada gambar tersebut dapatlah dijelaskan bahwa mekanisme kegiatan yang dilakukan petugas retribusi pada dasarnya ada dua yaitu memberikan tiket tanda pungutan yang harus di bayar setiap unit kendaraan masuk terminal dan pencatatan laporan dalam pembukuan harian di terminal hasil retribusi sesuai dengan jumlah tiket yang telah di serahkan. Selain itu terlihat pada gambar tersebut proses pungutan

dapat dikatakan sederhana hal ini agar proses pungutan tidak menghambat setiap kendaraan umum untuk secepatnya beroperasi namun demikian proses pencatatan sebagai laporan keuangannya wajib di catat sebagai pertanggungjawaban petugas sesuai piket pada hari tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Sintang diperoleh informasi bahwa setiap jenis kegiatan apapun yang menjadi kewenangan pada Dinas Perhubungan memiliki mekanisme pengawasan dari setiap kepala bidang dan langsung dari kepala Dinas. Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga kinerja dan akuntabilitas setiap pegawai yang ada dilapangan maupun di kantor yang berhubungan dengan administrasinya.

Selanjutnya dipaparkan juga bahwa peran pengawasan dari kepala Bidang akan di sampaikan kepada Kepala Dinas dalam rapat-rapat koordinasi dan pelaporan sehingga sangat kecil kemungkinan bagi setiap bidang melalaikan tugas pengawasannya. Adapun ketegasan terhadap kelalaian dalam pengawasan akan di berikan kepada setiap kepala Bidang sesuai dengan ranah yang di lakukan jika dipandang perlu sehubungan dengan tugas yang di kerjakan.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah terhimpun dari Kepala Dinas Perhubungan dapat di deskripsikan bahwa secara normatif peran setiap pimpinan menjadi unsur

utama dalam mengawasi pelaksanaan kerja dan juga terdapat peran koordinasi yang tidak boleh di kesampingkan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan akan selalu sama dan seimbang dengan aspek administrasinya. Peran Kepala Dinas dalam hirarki pengawasan yaitu sebagai pengambil kebijakan dan keputusan jika dalam koordinasi dan rapat evaluasi terdapat adanya permasalahan yang mendesak untuk segera di tindaklanjuti.

Berikutnya di paparkan juga oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat bahwa untuk pelaksanaan pungutan retribusi selalu mendapat pengawasan dari Kepala Bidang dalam bentuk pemantauan laporan yang disampaikan kepada kepala seksi. Pengawasan langsung dilaksanakan oleh setiap koordinator pada terminal masing-masing sesuai dengan penempatannya. Secara khusus pengawasan langsung dari kepala bidang memang tidak dilakukan akan tetapi koordinasi antara kepala seksi dalam menyampaikan laporan bulanan menjadi bahan telaah kepala bidang dalam menindak lanjutinya.

Berikutnya hasil wawancara Kepala Bidang diperoleh informasi bahwa terdapat adanya pengawasan eksternal dalam setiap administrasi di instansi khususnya pada setiap bidang. pengawasan tersebut dilakukan oleh Inspektorat dalam rangka melihat adanya tertib administrasi sesuai dengan kriteria pemerintah dan sesuai dengan program perencanaan kerja. Oleh karena adanya pengawasan demikian maka kepala bidang lebih mengarahkan pada pengawasan administrasi sedangkan

teknisnya pada kepala seksi penganalisaan dan operasional terminal.

Berdasarkan pada hasil informasi yang terhimpun dari Kepala Bidang perhubungan Darat dapatlah di deskripsikan bahwa peran pengawasan berlaku secara tersistematis dalam beberapa bentuk yaitu bentuk pengawasan langsung dilakukan pada unit kepala seksi. kepala seksi selanjutnya menyampaikan seluruh laporan dalam setiap analisis kepada kepala bidang dan dalam sistem pelaporan yang sudah mengacu pada standar pelaporan keuangan bidang masing-masing.

Sedangkan pengawasan secara teknis yang berupa pengawasan langsung telah ditempatkan petugas pelaksana teknis pungutan yang mengkoordinir pada setiap terminal sehingga kehadiran petugas pemungut retribusi dapat diawasi secara menyeluruh setiap waktu jam kerja. Pengawasan dengan demikian lebih mengacu pada pola sistematisasi melalui dua cara pendekatan yaitu pengawasan teknis langsung dilapangan dan juga melalui laporan-laporan baik keuangan dan juga kehadiran kerja.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan pada saat penelitian di terminal pasar Junjung Bui Kecamatan sintang terlihat setiap harinya ada unsur koordinator yang mengawasi secara langsung. Selain pengawasan melalui sistem pemantauan tersebut sistem administrasi juga menjadi media pengawasan yaitu dalam bentuk absensi yang harus di isi oleh petugas pada saat diterminal. Kehadiran

selain memberikan pencatatan juga mencantumkan nama dan tanda tangan sehingga jika terjadi kekeliruan dalam pembukuan dan laporan dapat ditelusuri siapa saja yang bertugas pada saat itu.

Pola pengendalian bagi setiap petugas yang sudah di jalankan dapat dikatakan cukup baik dan dapat mengurangi adanya pungutan liar baik yang dilakukan aparaturnya atau oknum lainnya yang mengambil keuntungan pribadi. Sedangkan untuk pengawasan tingkat masyarakat juga dapat dikatakan berjalan karena aktivitas masyarakat di terminal setiap harinya relatif ramai sehingga dapat saja menjadi bagian dari pengawasan yang tidak langsung.

Mengacu pada hasil-hasil observasi yang telah terhimpun tersebut khususnya dalam konteks pengawasan kehadiran dan juga kewenangan dalam mengambil pungutan retribusi sudah baik dan berjalan efektif. Pengawasan sebagai bagian dari kontrol pada setiap kegiatan pemerintah tentunya juga akan bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa terminal karena pungutan umumnya untuk kepentingan pembangunan sehingga manfaat dari pungutan dapat dirasakan masyarakat secara langsung berupa perbaikan fasilitas dan pengaturan terminal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapatlah disimpulkan beberapa aspek yaitu :

1. Mekanisme Pungutan Retribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri dilakukan

secara sederhana dan dinamis oleh setiap petugas, jangkauan pungutan belum sepenuhnya dilakukan untuk kendaraan angkutan umum dan barang di luar terminal.

2. Sistem Pengawasan Pungutan Retribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri dilakukan setiap hari melalui pengawasan langsung dan pengawasan laporan pembukuan.

Saran Penelitian yaitu :

1. Diharapkan Mekanisme Pungutan Retribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri tetap ditingkatkan untuk setiap kendaraan yang tidak masuk terminal namun melakukan aktivitas bongkar muat dan menurunkan penumpang di luar terminal agar tetap dikenakan retribusi.
2. Diharapkan Pengawasan Pungutan Retribusi Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tanjungpuri tetap di pertahankan karena sudah dilakukan secara berjenjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggraini, AM. Tri. 2002. *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Per se atau Rule of Reason*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gie, The Liang. 2007, *Analisis Administrasi Dan Manajemen*, Gramedia, Jakarta.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia.

Pandiangan.Liberti. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta : PT Elek Media.

Poerwadarminta, WJS. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Rahman, Herlina. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta : Arifgosita.

Suparno. 2003. *Penilaian Kinerja Dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta : BPFPE.

Widodo M.S, Joko. 2002. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : BayuMedia.

Yani, Mulia. 2000. *Mekanisme dan Strategi Pelayanan Birokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan daerah kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang